

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Strategi

1. Pengertian Strategi

Kata strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu “*strategos*” yang diartikan sebagai “*the art of the general*”. Pengertian strategi sendiri berasal dari konsep militer dimana terdapat sekelompok orang yang butuh dipimpin serta diberi arahan. Pada awal masa industrialisasi, istilah strategi masih dipakai dalam konotasi militer saja. baru setelahnya kepemimpinan diperlukan pula di bidang ekonomi. Pengertian strategi pun kian meluas hingga lahir lah strategi manajerial untuk memudahkan pengelolaan dalam sebuah organisasi. Konsep strategi makin meluas ke berbagai aspek masyarakat, termasuk bidang politik. Dalam bidang politik juga memiliki tujuan memimpin kelompok masyarakat, anggota partai politik dan organisasi ke arah sasarannya.

Pengertian strategi semakin diperhalus dan disesuaikan tidak hanya dalam kepentingan militer tetapi juga dalam kepentingan bisnis dan politik. perkembangan ini melahirkan perbedaan antara strategi dan taktik. Menurut Carl Von Clausewitz taktik merupakan ajaran tentang pemanfaatan angkatan perang dalam pertempuran untuk tujuan perang. Angkatan perang merupakan sarana untuk mencapai tujuan perang yaitu memperoleh kemenangan. Kemenangan itu hanyalah sarana untuk mencapai tujuan akhir dari strategi yakni perdamaian. Dengan demikian semakin

tinggi tingkat strategi akan semakin mewujud menjadi politik yang berkesinambungan hingga akhirnya tak ada perubahan lagi.¹

2. Strategi Politik Peter Schroder

Strategi politik adalah strategi yang digunakan untuk merealisasikan cita-cita politik. Contohnya adalah diberlakukannya peraturan baru, dijalankannya program deregulasi, privatisasi atau desentralisasi. Strategi politik biasa digunakan dalam usaha untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan terutama ketika pemilihan umum. Strategi tersebut berkaitan dengan strategi kampanye, yang bertujuan untuk memperoleh kekuasaan serta pengaruh sebanyak mungkin dengan cara meraih hasil yang maksimal pada saat pemilu. Langkah yang tidak direncanakan secara matang baik oleh partai maupun oleh pemerintah memberikan hasil proyek yang gagal dalam kebanyakan praktiknya yang mengakibatkan adanya perlawanan dari masyarakat, kemudian tidak menaati peraturan dan bahkan tidak mengakui keberadaan peraturan tersebut karena pemerintah dianggap terlalu lemah untuk menerapkannya.

Strategi politik bukan hanya untuk partai politik dan pemerintah saja , tetapi juga untuk organisasi non-pemerintahan yang juga aktif dalam politik semuanya membutuhkan strategi untuk mencapai tujuan jangka panjang mereka. Tanpa strategi politik , perubahan jangka panjang atau proyek besar sama sekali tidak dapat diwujudkan. Perencanaan strategis untuk perubahan dan proses politik merupakan suatu analisa yang jelas dari keadaan kekuasaan, gambaran yang jelas

¹ Peter Schroder, *Politische Strategien*, terj. Aviantie Agoesman. (Jakarta: Friedrich-Nauman-Siftung fuer die freiheit, 2010), hal 21-22.

tentang tujuan akhir yang akan dicapai dan pemusatan segala kekuatan untuk mencapai tujuan termaksud .

3. Model Perencanaan Strategi Politis

Ada dua pola yang diutamakan dalam proses perencanaan politis, yang pertama adalah pola perencanaan berdasarkan SWOT (*Strenght, Weakness, Opportunities and Threats*) dan yang kedua adalah perencanaan konseptual.

a) Analisa SWOT

Menurut SWOT, perencanaan strategi yang baik bekerja pada dua tingkat. Di tingkat yang pertama , perencanaan strategi membuat gambaran yang jelas mengenai arah yang akan dituju oleh organisasi tersebut (visi) serta apa yang menjadi alasan dan tujuan dari adanya organisasi tersebut. Di tingkat kedua , perencanaan strategi melakukan upaya untuk memposisikan organisasi berdasarkan realitas lingkungannya. Terdapat dua jenis lingkungan dalam perencanaan strategi yakni, lingkungan eksternal yang merupakan wilayah dimana kekuatan atau faktor lain mampu mempengaruhi atau juga dipengaruhi oleh organisasi tersebut. Kemudian lingkungan internal, yang terdiri atas sumberdaya , kekuatan, peluang, serta tuntutan dari dalam organisasi itu sendiri. Perencanaan strategi harus mampu mengenali serta menilai peluang juga ancaman yang terjadi di lingkungan eksternal yang berhubungan dengan visi juga tujuan akhir organisasi.

b) Perencanaan Konseptual

Metode ini menjamin bahwa perubahan atas strategi yang telah direncanakan hanya dilakukan apabila batas nilai *treshhold* terlewati, sehingga

terjadi ketenangan dan menghindari reaksi yang tergesa-gesa serta terlalu emosional. Disisi lain perencanaan konseptual memandang faktor lingkungan sebagai variabel , karena tujuan dari strategi politik adalah untuk mengubah lingkungan, masyarakat serta kerangka hukum.

Perencanaan konseptual terdiri dari 10 langkah , langkah-langkah tersebut terbagi dalam 3 fase, yaitu :

- 1) Perumusan misi dan analisa situasi
- 2) Keputusan strategis
- 3) Implementasi strategi

10 langkah perencanaan tersebut ialah :

- 1) Merumuskan misi

Perumusan misi menjabarkan apa saja yang perlu direncanakan secara strategis. Setidaknya harus ada tiga elemen yang terccakup didalamnya yaitu, tujuan secara keseluruhan yang menguraikan posisi yang ingin dicapai. Kedua, alasan pentingnya mencapai tujuan secara keseluruhan dan ketiga, kerangka waktu dimana keseluruhan tujuan harus dicapai.

- 2) Penilaian situasional dan evaluasi

Fakta-fakta yang dikumpulkan dikelompokkan ke dalam kekuatan dan kelemahan, serta kemungkinan keberhasilan tujuan terealisasi. Fakta-fakta tersebut ialah fakta organisasi sendiri, fakta mengenai pekerja dan fakta lingkungan dimana akan dicapai

3) Perumusan sub strategi

Apabila penilaian situasional telah selesai, menjadi jelas sebuah strategi akan dijalankan sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan atau masih perlu untuk direvisi. Ada tiga tahap perumusan strategi yaitu, menyusun tugas-tugas, merumuskan strategi serta mengevaluasi strategi.

4) Perumusan sasaran

Setelah sasaran diputuskan strategi dipindahkan ke unit-unit taktis dan diimplementasikan melalui pembagian tugas, sasaran harus menggambarkan keadaan pada akhir sebuah proses dalam jangka waktu tertentu. Sasaran tersebut harus dapat dicapai, fokus pada tujuan utama yang telah disebutkan dalam perencanaan. Apabila sasaran telah dirumuskan, strategi harus dijalankan dan direalisasikan.

5) Target *image* (citra yang diinginkan)

Target *image* ditentukan oleh keputusan strategis mengenai perumusan tugas serta pilihan yang dibuat berkaitan dengan isu, gaya, jenis konfrontansi dan orang-orang yang diperhitungkan.

6) Kelompok-kelompok target

Kelompok target adalah kelompok masyarakat atau organisasi yang penting untuk tercapainya misi. Mereka perlu didekati untuk waktu yang telah ditentukan. Kelompok target ini diidentifikasi dengan menginterpretasikan keputusan strategis, khususnya tujuan taktis juga melalui analisa citra yang diinginkan (target *image*).

7) Pesan kelompok target

Kelompok target membutuhkan informasi tertentu berdasarkan keputusan strategis yang telah diambil sebelumnya, guna kemungkinan reaksi yang sesuai dengan apa yang telah direncanakan secara strategis.

8) Instrumen-instrumen kunci

Pemilihan instrumen kunci berkaitan dengan aksi dan alat komunikasi yang akan digunakan hal-hal tersebut disesuaikan secara khusus bagi kelompok target.

9) Implementasi strategi

Dalam mengimplementasikan strategi politik, faktor manusia menjadi sangat penting dalam tiga aspek : pimpinan politik, pimpinan partai dan anggota partai. Hubungan antara ketiga pihak ini ialah kuantitas, kualitas, pendidikan, etika dan motivasi menjadi syarat awal bagi keberhasilan implementasi strategi.

10) Pengendalian strategi

Pengendalian strategi terdiri dari dua unsur, kedua unsur tersebut menentukan keberhasilan penerapan suatu strategi. Unsur pertama, prinsip pengumpulan data intelijen dan perolehan informasi. Unsur kedua, prinsip keamanan dan perlindungan informasi di pihak sendiri, atau perlindungan terhadap tindakan penyusupan dari organisasi lawan.

B. Partisipasi Politik

Menurut Miriam Budiardjo (1981:1) Partisipasi politik adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara

aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan cara memilih pemimpin negara baik secara langsung maupun tidak langsung, kemudian ikut mempengaruhi kebijakan pemerintah. Kegiatan tersebut mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai dan sebagainya.

Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson memberi tafsiran yang lebih luas dengan memasukkan secara eksplisit tindakan ilegal dan kekerasan. Partisipasi politik adalah kegiatan warga yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk memengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif.

1. Penggolongan Partisipasi Politik

Ada beberapa cara dalam mengkategorikan partisipasi politik, bisa digolongkan berdasarkan partisipasi aktif dan partisipasi pasif, dimensi stratifikasi sosial, jumlah pelaku, tinggi rendahnya kesadaran politik, frekuensi serta intensitasnya, juga konvensional dan non konvensional. (Surbakti, 1992: 142-143; Budiardjo, 1981: 5-6; Mas'ood dan MacAndrews, 1981: 44).

a) Penggolongan Berdasarkan Partisipasi Aktif dan Partisipasi Pasif

Partisipasi aktif merupakan kegiatan yang berorientasi pada proses *input* serta *output* politik, contoh dari partisipasi aktif misalnya mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan, mengajukan usul

mengenai suatu kebijakan umum, mengajukan alternatif kebijakan umum yang lain dengan yang dibuat oleh pemerintah. Sedangkan partisipasi pasif merupakan kegiatan yang berorientasi pada proses *output*, kegiatan partisipasi pasif ialah menerima serta melaksanakan setiap keputusan yang diberikan oleh pemerintah atau mentaati pemerintah.

b) Penggolongan Partisipasi Politik Berdasarkan Stratifikasi Sosial

Partisipasi politik dilihat dari dimensi stratifikasi sosial menurut Olsen meliputi enam lapisan yaitu, aktivis politik, pemimpin politik, warga negara, komunikator, marginal dan orang yang terisolasi. Enam lapisan ini dimaksudkan untuk memudahkan analisis terhadap bentuk-bentuk partisipasi politik. Kenyataannya, tidak ada seorang pun yang dapat secara persis dikategorikan ke dalam salah satu tipe partisipasi politik.

c) Penggolongan Partisipasi Politik Berdasarkan jumlah pelaku

Penggolongan partisipasi politik ini berupa individual dan kolektif, individual merupakan seseorang yang menulis surat berisikan tuntutan atau keluhan kepada pemerintah. Sedangkan kolektif merupakan kegiatan warga negara secara serentak untuk mempengaruhi penguasa, contohnya melakukan pemogokan yang tidak sah, melakukan hura-hura atau menguasai bangunan umum.

d) Penggolongan Partisipasi Politik Berdasarkan Tinggi Rendahnya Kesadaran Politik

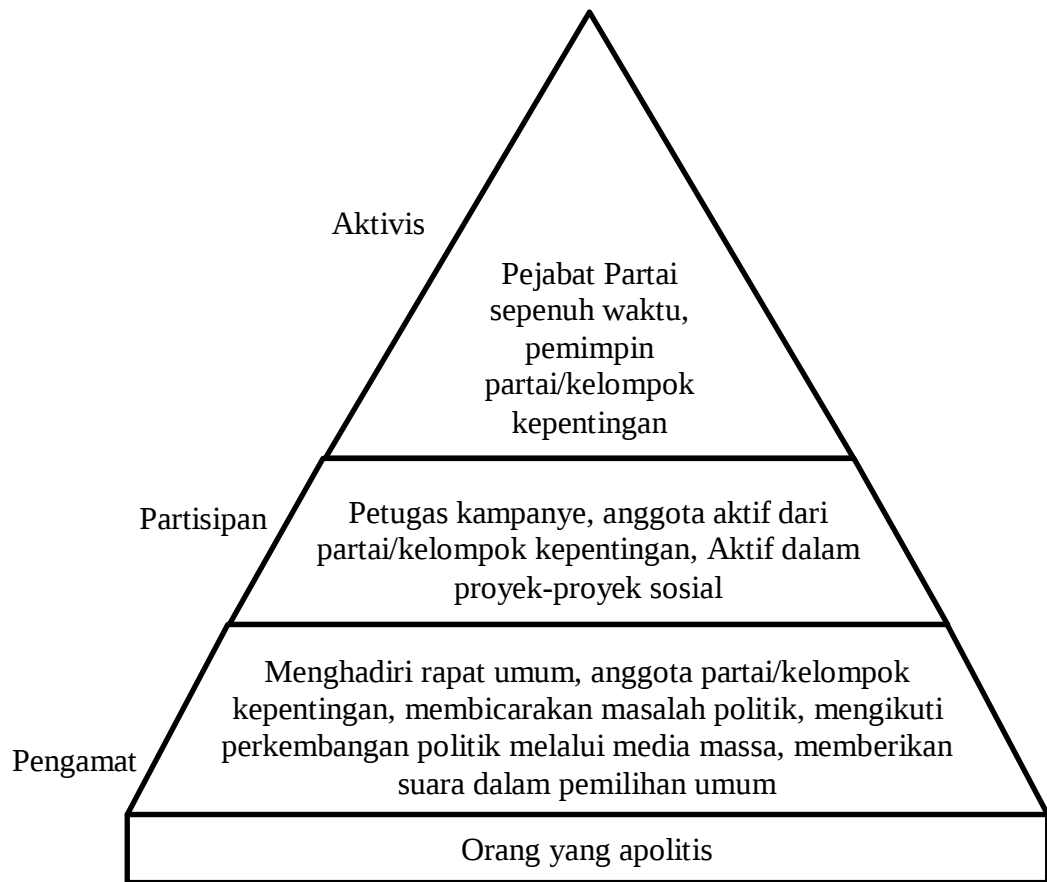
Ditinjau dari tinggi rendahnya kesadaran politik serta kepercayaan pemerintah, Paige membagi partisipasi politik menjadi empat tipe.

Partisipasi aktif, partisipasi pasif, partisipasi pasif-tertekan (apatis) dan partisipasi militan radikal. Kesadaran politik serta kepercayaan kepada pemerintah yang tinggi cenderung membuat partisipasinya aktif, sedangkan jika kesadaran politiknya sangat rendah tetapi kepercayaan kepada pemerintahnya tinggi maka partisipasi ini disebut tidak aktif (pasif). Kemudian jika kesadaran politik serta kepercayaan kepada pemerintahnya rendah rendah, maka partisipasi politiknya cenderung pasif-tertekan (apatis). Terakhir, apabila kesadaran politik tinggi tetapi kepercayaan kepada pemerintah sangat rendah maka partisipasi militan radikal akan terjadi.

e) Penggolongan Partisipasi Politik Berdasarkan Frekuensi dan Intensitas

Partisipasi dibedakan menjadi pengamat, partisipan dan aktivis.

Partisipasi politik berdasarkan frekuensi digambarkan dalam bentuk piramida partisipasi sebagai berikut :

Gambar 1.**Piramida Partisipasi Politik**

Sumber : Budiardjo, [ed.], 1981:6

f) Penggolongan Partisipasi Politik dalam Konvensional dan Non Konvensional

Menurut Gabriel Almond kegiatan politik yang konvensional adalah partisipasi politik yang normal dalam demokrasi modern. Sementara itu bentuk non konvensional ada yang termasuk ke dalam legal seperti petisi dan ada yang ilegal seperti tindakan politik penuh kekerasan dan revolusioner. Frekuensi dan bentuk partisipasi politik dapat digunakan

sebagai alat ukur untuk menilai stabilitas politik, integritas kehidupan politik dan puas, tidak puasnya warna negara.

C. Pemilihan Umum Kepala Daerah

1. Pengertian Pemilihan Umum Kepala Daerah

Pemilihan Umum Kepala Daerah yang meliputi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota merupakan bentuk dari pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota yang dilakukan secara langsung dan demokratis. Menurut Ramlan Pemilihan Umum Kepala Daerah merupakan sebuah mekanisme penyeleksian serta pendelegasian atau bisa disebut sebagai penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai politik yang dipercaya.

Dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara pemilu harus melaksanakan pemilu berdasarkan asas :

- Langsung, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya bukan dengan perantara.
- Umum, seluruh warga negara dijamin dan mendapatkan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi baik berdasarkan suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin atau pun status sosial.
- Bebas, seluruh warga negara bebas menentukan pilihan tanpa ada paksaan dari pihak mana pun dan dijamin keamanannya dalam melaksanakan haknya.
- Rahasia, pemilih mendapatkan jaminan bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dan dengan jalan apapun.

- Jujur, seluruh penyelenggara pilkada, aparat pemerintah, peserta pilkada, pemantau pilkada serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak dengan jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Adil, setiap calon/peserta mendapatkan perlakuan yang sama, bebas dari kecenderungan pihak manapun.

2. Tujuan Pemilihan Umum Kepala Daerah

Penyelenggaraan pemilu bertujuan untuk memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis, sebagaimana diketahui bahwa pelaksanaan pemilu merupakan simbol dari kedaulatan rakyat. Dengan diselenggarakannya pemilu rakyat bisa memilih Kepala Negara atau Kepala Daerah yang kuat dari rakyat, sehingga mampu menjalankan fungsi-fungsi kekuasaan pemerintahan negara dalam mencapai tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam UUD Negara Republik Indonesia.

3. Parameter Demokrasi Pemilihan Umum Kepala Daerah

Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dapat disebut demokratis apabila memenuhi beberapa parameter atau alat ukur. Menurut Robert Dahl, Samuel Huntington dan Bigham Powel (1978) parameter yang digunakan untuk mengamati terwujudnya suatu demokrasi apabila :

- Mekanisme pemilihan umum yang digunakan teratur

Dalam rekrutmen politik harus dilakukan dengan pemilihan umum yang diselenggarakan secara teratur dengan tenggang waktu yang jelas, kompetitif, jujur dan adil. Pemilu merupakan gerbang pertama yang harus dilewati karena dengan pemilu lembaga demokrasi dapat terbentuk.

- Rotasi kekuasaan

Kekuasaan tidak boleh dan tidak bisa dipegang terus-menerus oleh seseorang seperti dalam sistem monarki. Jika seseorang atau partai politik berkuasa secara terus menerus dan mengendalikan roda pemerintahan secara dominan dari waktu ke waktu, sistem tersebut kurang layak disebut demokratis. Demokrasi memberikan peluang rotasi kekuasaan secara teratur dan damai kepada setiap orang yang ingin mencalonkan dirinya sebagai kepala daerah.

- Akuntabilitas publik

Kepala Daerah atau pemegang jabatan publik harus dapat mempertanggungjawabkan setiap tindakan yang ia lakukan, serta dapat memberikan penjelasan dan pemahaman kepada masyarakat mengenai kebijakan yang dipilih dan apa yang mereka lakukan terbuka untuk dipertanyakan kepada publik.

- Mekanisme rekrutmen terbuka

Demokrasi membuka peluang bagi semua orang untuk berkompetisi dalam mengisi jabatan politik, dengan memenuhi syarat yang telah ditentukan, dalam negara totaliter dan otoriter rekrutmen politik hanyalah merupakan domain dari seseorang atau sekelompok orang kecil.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang telah dilakukan dan sudah mendapatkan hasil serta kesimpulan dari penelitiannya, penelitian terdahulu dalam penelitian dijadikan sebagai pijakan atau gambaran dalam penelitian ini. Penelitian

terdahulu yang memiliki kesamaan tema dan bahasan penelitian tetapi dengan objek yang berbeda. Manfaat dari penelitian terdahulu ini adalah untuk mengetahui bagaimana hasil yang telah didapatkan oleh peneliti terdahulu.

Penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai bahan referensi oleh penulis dalam penelitiannya ini diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Muh Imam Adli Aqil (2015) dengan judul Peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Masyarakat Pada Pemilu Presiden Tahun 2014. Dalam penelitiannya menjelaskan bahwa masyarakat di kabupaten Gowa telah berpartisipasi dalam Pemilihan Presiden pada tanggal 9 juli 2014, namun peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gowa dirasa masih belum efektif dalam meningkatkan partisipasi pemilih. Ia juga menyebutkan berdasarkan data laporan KPU jumlah pemilih setiap diselenggarakannya pemilu selalu mengalami peningkatan. Hal yang menjadi sorotannya ialah jumlah yang tidak menggunakan hak pilihnya pun juga terus meningkat.

Meskipun KPU merasa telah melakukan hal yang maksimal ada beberapa hal lainnya yang dapat membantu meningkatkan partisipasi pemilih diantaranya :

- a. Bekerja sama dengan media massa dengan menyajikan tayangan yang mendidik agar para pemilih dapat menentukan pilihannya berdasarkan hati nurani,
- b. KPU kabupaten Gowa diharapkan lebih gencar dalam melakukan sosialisasi,
- c. Masyarakat juga harus lebih membuka wawasan mengenai pemilu serta mengikuti segala informasi bahkan sosialisasi yang dilakukan oleh KPU kabupaten Gowa.

Selain penelitian yang dilakukan oleh Muh Imam Adli Aqil, Siti Muslimah (2016) melakukan penelitian dengan judul Evaluasi Strategi Penyelenggara Pemilu

Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula di Pemilihan Umum Kepala Daerah 2015 (Studi Pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Way Kanan). Dalam penelitiannya strategi yang dilakukan oleh KPU dalam penyelenggaraan pemilu untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada pemilihan umum kepala daerah 2015 dianggap sukses. Situasi tersebut terjadi karena formulasi strategi disusun dengan baik begitu juga dalam implementasinya. Adapun faktor pendukung dan faktor penghambat dalam penyelenggaraan pemilu dalam menjalankan strateginya antara lain jumlah pemilih pemula yang selalu bertambah setiap tahunnya, pembagian tugas dan fungsi yang jelas oleh KPU, pengadaan fasilitas yang cukup memadai, serta terdapat organisasi pemuda yang ikut serta dalam mensukseskan program yang dibuat oleh KPU menjadi faktor pendukung.

Sedangkan, meskipun telah melakukan strategi banyak pula faktor penghambat dalam peningkatan partisipasi masyarakat diantaranya penganggaran yang berasal dari APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) yang menggunakan sistem tahapan karena masih terkontaminasi oleh kepentingan politik lokal daerah. Kurang maksimalnya sosialisasi pendidikan pemilih, belum melibatkan organisasi kemasyarakatan, serta kurang maksimalnya KPU dalam memberikan informasi mengenai DPT.

Kemudian ada juga penelitian yang dilakukan oleh Nur Antika Agustin Putri (2015) dengan judul Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bantul dalam Mengurangi Angka Golput Pada Pilkada 2015 (Studi Deskriptif Kualitatif KPU Kabupaten Bantul). Dalam penelitiannya strategi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bantul terdiri dari beberapa metode seperti metode

tatap muka dan dialog secara menarik, penggunaan media cetak dan elektronik secara maksimal, serta bentuk lainnya yang memudahkan masyarakat untuk dapat menerima informasi pemilu. strategi yang telah dilakukan tersebut bisa dikatakan berhasil, hal ini dilihat dari angka golput pada Pilkada tahun 2015 telah berkurang dari pilkada sebelumnya pada tahun 2010 sebanyak 26,31% masyarakatnya golput sedangkan pada tahun 2015 mengalami penurunan menjadi 24,73%. Meskipun belum 100% angka golput dapat diatasi KPU Kabupaten Bantul merupakan Kabupaten dengan angka golput terendah dari Kabupaten Sleman dan Kabupaten Gunung Kidul yang juga melaksanakan Pilkada pada tahun 2015.

Tabel 2.

**PERBANDINGAN PENELITIAN-PENELITIAN TERDAHULU
DENGAN PENELITIAN YANG SEDANG DILAKUKAN**

No	Nama Peneliti	Metode	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1.	Muh Imam Adli Aqil Peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Masyarakat pada Pemilu Presiden Tahun 2014	Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan <i>library research</i> dan <i>field research</i>	peran KPU dirasa belum maksimal, tingkat partisipasi masyarakat yang memberikan suaranya memang meningkat namun masyarakat yang tidak memberikan suara jumlahnya jauh lebih besar.	Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini dapat dilihat dari objek penelitian, fokus penelitian dan lokasi penelitiannya yang berbeda	Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah tercantum, persamaan penelitian ini yaitu dalam topik penelitian mengenai KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih.

2.	Siti Muslimah Evaluasi Strategi Penyelenggara Pemilu dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula di Pemilihan Umum Kepala Daerah 2015 (Studi pada Komisi Pemilihan Umum Way Kanan)	Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.	Dalam penelitiannya strategi KPU pada pemilu pada 2015 dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula dianggap sukses. Faktor yang mempengaruhinya ialah jumlah pemilih pemula yang terus meningkat tiap tahunnya serta adanya kerjasama yang baik antara KPU dengan pihak lainnya yang ikut berperan.	Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini dilihat dari objek penelitian, fokus penelitian dan lokasi penelitian yang berbeda	Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah tercantum, persamaan penelitian ini yaitu dalam topik penelitian mengenai strategi yang dilakukan KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih.
3.	Nur Antika Agustin Putri Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bantul dalam Mengurangi Angka Golput pada Pilkada 2015 (Studi Deskriptif Kualitatif KPU Kabupaten Bantul)	Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan menggunakan teori strategi komunikasi.	strategi komunikasi KPU dianggap berhasil dengan melihat data penurunan tingkat golput pada tahun 2015 dengan tahun sebelumnya. Metode yang dilakukan antara lain tatap muka dan dialog secara menarik	Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini dapat dilihat objek penelitian, fokus penelitian dan lokasi penelitian yang berbeda	Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah tercantum, persamaan penelitian ini yaitu dalam topik penelitian mengenai strategi KPU.

E. Kerangka Pemikiran

Pemilu merupakan pesta demokrasi rakyat, mulai dari pemilihan presiden hingga kepala desa semua dipilih langsung oleh rakyat. Pemilu menjadi salah satu tombak utama negara yang demokratis. Partisipasi politik masyarakat sangat dibutuhkan dalam membangun negara yang demokratis, salah satunya dengan menggunakan hak pilihnya ketika pemilu datang. Tingginya partisipasi masyarakat menandakan bahwa masyarakat telah memiliki kesadaran dan pemahaman mengenai partisipasi politik namun rendahnya tingkat partisipasi masyarakat bukan berarti bahwa masyarakat kurang memahami dan peduli tetapi bisa juga karena rezim yang buruk, tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah berkurang dan faktor lainnya yang setiap wilayah atau daerah memiliki perbedaan dalam hal partisipasi politik.

Di Kota Tasikmalaya tingkat partisipasi masyarakat mengalami peningkatan dari tahun ke tahun tiap diselenggarakannya pemilihan umum. Hingga pada pemilihan Gubernur Jawa Barat tahun 2018 Kota Tasikmalaya mendapatkan penghargaan sebagai daerah dengan tingkat partisipasi tertinggi pertama pada Pemilihan Gubernur Jawa Barat tahun 2018. Strategi yang dilakukan KPU Kota Tasikmalaya terbilang sukses.

Strategi politik dan partisipasi politik merupakan konsep yang digunakan dalam penelitian ini. Strategi politik berkaitan dengan perencanaan yang digunakan oleh KPU Kota Tasikmalaya, sedangkan partisipasi politik berkaitan dengan peningkatan partisipasi pemilih pada pemilihan Gubernur Jawa Barat tahun 2018.

Selain itu, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yang bertujuan untuk menemukan makna daripada generalisasi serta menyelidiki dan memahami sebuah kejadian atau masalah yang telah terjadi dengan mengumpulkan berbagai macam informasi yang kemudian diolah untuk mendapatkan sebuah solusi agar masalah yang diungkap dapat terselesaikan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian diantaranya, wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah mengetahui strategi yang digunakan oleh KPU dalam peningkatan partisipasi pemilih pada pemilihan Gubernur Jawa Barat tahun 2018 serta mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam meningkatkan partisipasi pemilih di Kota Tasikmalaya.

Tabel 3.
Kerangka Pemikiran

